

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MELALUI
E-WARONG DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKAKAK
KABUPATEN SUKABUMI**

Herdiawan Waryadi

Email: herdiawanwaryadi@gmail.com

BPKAD Kabupaten Sukabumi

Nanon Hanriana

Email : nhanriana@gmail.com

Bagian Umum SETDA Kabupaten Sukabumi

Abstract

This research is motivated by the suspicion that the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program through e-warong in Sukamaju Village, Cikakak District, Sukabumi Regency has not been optimal in meeting the food needs of the community. The purpose of this research is to determine: (1) employee behavior (2) work relations between employees, (3) employee communication, and (4) the leadership of the Village Head in relation to the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program to fulfill the needs food in Sukamaju Village, Cikakak District. This study uses a qualitative approach. The informants of this research were the Head of Sukamaju Village, PKH BPNT Facilitator in Sukamaju Village, and KPM BPNT Sukamaju Village. The results of the study include (1) employee behavior in relation to the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program to fulfill food needs in Sukamaju Village, Cikakak Subdistrict, is quite good, (2) working relations between employees in relation to the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program.) to fulfill food needs in Sukamaju Village, Cikakak Subdistrict, (3) employee communication in relation to the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program to meet food needs in Sukamaju Village, Cikakak Subdistrict, is quite good, and (4) the leadership of the Village Head in relation to the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program to meet food needs in Sukamaju Village, Cikakak District is quite good.

Keywords: *Implementation, program, BPNT, e-Warong*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dugaan bahwa implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong Di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perilaku pegawai (2) hubungan kerja antar pegawai, (3) komunikasi pegawai, dan (4) kepemimpinan Kepala Desa dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa Sukamaju, Pendamping PKH BPNT Desa Sukamaju, dan KPM BPNT Desa Sukamaju. Hasil penelitian antara lain (1) perilaku pegawai kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik, (2) hubungan kerja antar pegawai dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik, (3) komunikasi pegawai dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik, dan (4) kepemimpinan Kepala Desa dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik.

Kata Kunci: Implementasi, program, BPNT, e-Warong

Submitted: 2-09-2022 | Accepted: 23-09-2022 | Published: 24-09-2022

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sejak krisis pangan tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara *targetted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat, kemudian

berganti nama menjadi beras untuk keluarga sejahtera (Rasta). Program ini sangat strategis dan merupakan program nasional lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.

Salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah program penanganan fakir miskin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin yang secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang bekerjasama dengan Bank.

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rasta untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Program BPNT ini merupakan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, dinyatakan bahwa tujuan program BPNT adalah:

- 1) mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- 2) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT;
- 3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
- 4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Adapun potensi yang dimiliki Desa Sukamaju berkaitan dengan bantuan pangan non tunai (BPNT), antara lain:

- 1) Telah terdatanya masyarakat yang memenuhi syarat dalam menerima bantuan
- 2) Telah tersedianya e-warong yang ditunjuk dalam penyaluran bantuan
- 3) Masyarakat penerima bantuan telah menerima kartu sebagai bukti ke absahan untuk memperoleh bantuan

Namun demikian, dalam pelaksanaannya Program BPNT di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak belum berjalan optimal. Pada saat melakukan *prasurvey* terdapat beberapa permasalahan. *Pertama*, kurang transparansi harga masing-masing komoditi. E-warong sebagai penyalur bantuan tersebut harusnya bisa transparan mengenai komoditi dan harga yang KPM dapatkan setiap pembelanjannya. Dengan bantuan yang besarnya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) seharusnya KPM mampu memilih kebutuhan sembako, namun pada kenyataannya KPM hanya menerima komoditi yang telah ditetapkan oleh e-warong tersebut sehingga dengan terpaksa KPM membawa komoditi yang diberikan walaupun tidak begitu dibutuhkan. Selain itu, perkiraan harga setiap komoditi tidak mencapai besaran yang dibelanjakan ke e-warong.

Kedua, keterlambatan pengisian saldo kartu BPNT. Beberapa Kartu BPNT warga belum terisi saldo, padahal didalam aturan setiap warga penerima bantuan harus memperlihatkan struk (kertas bukti) sebagai acuan pada pengajuan selanjutnya. Dengan kondisi ini, nampak tumpukan beras yang seharusnya didistribusikan pada tahap sebelumnya terpaksa tidak bisa disalurkan menunggu saldo masuk.

Ketiga, keterlambatan operasional e-warong. Hal lain yang menyebabkan belum berjalan dengan maksimalnya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut adalah adanya tempat-tempat atau warung-warung yang sudah ditunjuk untuk pengambilan bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut belum aktif,

sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk mengambilnya. Akibatnya KPM harus belajar lebih bersabar menunggu e-warong tempat mereka menggantungkan sebagian kebutuhan hidupnya aktif beroperasi

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perilaku pegawai dalam kaitan dengan implementasi program BPNT melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak?
- 2) Bagaimanakah hubungan kerja antar pegawai dalam kaitannya dengan implementasi program BPNT melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak?
- 3) Bagaimanakah komunikasi pegawai dalam kaitannya dengan implementasi program BPNT melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak?
- 4) Bagaimanakah kepemimpinan Kepala Desa dalam kaitannya dengan implementasi program BPNT melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak?

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui perilaku pegawai dalam kaitan dengan implementasi program BPNT melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak.
- 2) Mengetahui hubungan kerja antar pegawai dalam kaitannya dengan implementasi program BPNT melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak.
- 3) Mengetahui komunikasi pegawai dalam kaitannya dengan implementasi program BPNT melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak.
- 4) Mengetahui kepemimpinan Kepala Desa dalam kaitannya dengan implementasi program BPNT melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi:

- 1) Pemerintah Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi sebagai bahan masukan dalam peningkatan pola implementasi kebijakan/program. Dengan demikian, apapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai guna sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam penerapan suatu kebijakan di masa yang akan datang.

- 2) Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
- 3) masyarakat penelitian ini diharapkan membuka kesadaran masyarakat bahwa program pemerintah sifatnya sebagai stimulan, sehingga kemandirian masyarakat dalam pengentasan kemiskinan tetap terbina dengan baik.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Konsep Implementasi Program

Menurut Jones (dalam Yulianti, 2019: 13), program dimaknai sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- 1) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- 2) Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- 3) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Dengan demikian suatu program merupakan rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Program merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, juga berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sedangkan dalam The Merriam-Webster Dictionary (dalam Yulianti, 2019: 13) dinyatakan bahwa secara etimologis konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Lebih lanjut Yulianti (2019: 13) mengatakan bahwa implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Horton dan Hunt dalam Praja (2020: 1) menambahkan bahwa implementasi suatu program atau kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, dapat dikatakan bahwa implementasi menunjukkan seluruh untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan/program. Dengan membuat kebijakan tersebut pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap suatu kebijakan/program yang akan dirasakan oleh masyarakatnya. Karena implementasi akan menghasilkan suatu akibat dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu keputusan kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Program

Dalam model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Indiahono, 2009: 31-33)) berpendapat bahwa faktor faktor keberhasilan implementasi suatu program adalah faktor birokrasi. Faktor faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

Subarsono dalam Malawat dan Liantie (2019: 35) mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Sementara itu Terry dalam Hasibuan (2019: 184-216) mengemukakan 4 (empat) faktor yang memengaruhi pelaksanaan (*implementasi*) yaitu tingkah laku manusia, hubungan manusiawi, komunikasi, dan kepemimpinan.

1) Tingkah laku

Manajemen perilaku atau *behavioral management* adalah sebuah perspektif yang menekankan pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu dalam sebuah organisasi, serta pentingnya manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan individu agar organisasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Prinsip dasarnya adalah, semua perilaku individu yang ada di dalam organisasi harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu maka dibutuhkan serangkaian penataan, pengaturan, dan pengelolaan agar semua perilaku individu tersebut dapat selaras dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.

Ada banyak bentuk penataan, pengaturan, dan pengelolaan perilaku individu tersebut, diantaranya yang dianggap penting adalah melalui serangkaian proses belajar sebagai mekanisme *charging* bagi peningkatan kapasitas individu dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mekanisme *charging* ini bisa dilakukan dengan cara mengundang pihak ketiga yang dipandang *expert* di bidangnya.

Manusia dalam berkelompok mempunyai latar belakang yang heterogen, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, agama, kebudayaan, kepentingan dan lain sebagainya. Tetapi di samping perbedaan ini juga terdapat persamaan, seperti kebutuhan (*needs*) untuk makan, minum, keamanan, keturunan atau biologis. Persamaan kebutuhan inilah yang membentuk kerjasama dan hidup berkelompok. *Needs* (kebutuhan) adalah yang diperlukan oleh setiap orang, sedangkan *wants* (keinginan) adalah yang ditentukan oleh cita-cita seseorang.

Pemberian motivasi oleh pimpinan kepada staf mengenai kesediaan untuk beraksi dan bertindak positif seperti berpartisipasi aktif terhadap pimpinan. Motivasi ini berkaitan dengan perilaku manusia, dan dalam hal itu perlu dipahami segi-segi psikologisnya. Menurut Mangkunegara (2010: 61) motivasi adalah energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri (*drive arousal*) yang terbentuk dari sikap (*attitude*) pegawai dalam menghadapi situasi kerja di organisasi. Motivasi sangat penting artinya dalam mencapai suatu tujuan organisasi dan sasaran kerja. Karena itu, motivasi bagi seseorang merupakan modal utama untuk berprestasi sebab akan memberikan dorongan

bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

Lebih lanjut, Mangkunegara (2010: 61-62) menyatakan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) prinsip dalam memotivasi kerja karyawan, yaitu:

- a. Prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pimpinan.
- b. Prinsip komunikasi. Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.
- c. Prinsip mengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil didalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.
- d. Prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin.
- e. Prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin.

2). Hubungan manusiawi

Hubungan manusiawi yang merupakan istilah umum sering menggambarkan cara seorang manajer berinteraksi dengan bawahannya. Bila manajemen personalia memotivasi lebih besar untuk lebih baik dalam bekerja, maka hubungan manusiawi dalam organisasi tersebut "baik" dan begitu juga sebaliknya. Hubungan manusiawi (*human relations*) adalah hubungan antara orang-orang, yang dilakukan dalam suatu organisasi. Jadi bukan hubungan dalam arti kekeluargaan. Hubungan manusiawi ini tercipta serta didorong oleh kebutuhan dan kepentingan yang sama, misalnya untuk memperoleh pendapatan, keamanan, kekuatan, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat menghormati, saling membutuhkan dan kerjasama diantara semua pihak untuk mencapai tujuan. Kerjasama ini akan tercipta dan terbina dengan baik, jika

ada pengertian kebersamaan, saling menguntungkan, dan adanya kesediaan mengorbankan sebagian dari kepentingannya masing-masing.

Sementara itu, Siagian (2001: 154) mengemukakan bahwa pelaksanaan (implementasi) berhubungan erat dengan manusia yang ada di balik organisasi yaitu tumbuh kembangnya kemauan mereka secara ikhlas, sadar dan sukarela bersedia melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu aspek yang harus diperhatikan adalah manusia. Hal ini bertumpu kepada *Human Relationship* (HR) / hubungan antar manusia. Lebih lanjut, Siagian (2001: 155) mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan (implementasi), maka pelaksana perlu memahami benar tujuan organisasi dan prinsip-prinsip *human relationship* yaitu:

- 1) Sinkronisasi antara individu para anggota organisasi;
- 2) Suasana kerja yang menyenangkan;
- 3) Hubungan kerja yang harmonis;
- 4) Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin atau robot;
- 5) Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat yang optimal;
- 6) Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan;
- 7) Pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang tinggi;
- 8) Tersedia sarana dan prasarana kerja yang memadai;
- 9) Penempatan tenaga kerja yang tepat;
- 10) Imbalan yang setimpal dengan jasa yang diberikan.

3). Komunikasi

Lewis dalam Rifa'i dan Fadhli (2013: 126) mengemukakan bahwa komunikasi mencakup seluruh aktivitas manusia, dalam komunikasi terjadi pertukaran pesan yang dihasilkan dari pembagian makna antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Komunikasi adalah satu elemen penting dalam organisasi untuk menghasilkan kinerja yang diinginkan untuk dicapai.

Komunikasi (*communication*) merupakan hal yang terpenting dalam manajemen, karena proses manajemen baru terlaksana jika komunikasi dilakukan. Pemberian perintah, laporan, informasi, berita, saran, dan menjalin hubungan-hubungan hanya dapat dilakukan dengan komunikasi, tanpa komunikasi proses manajemen tidak terlaksana. Komunikasi sangat menentukan proses manajemen. Untuk menjalin hubungan yang baik antar individu diperlukan komunikasi yang efektif guna mencapai hubungan kerjasama

yang baik. Proses komunikasi sebagai bentuk penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan tidaklah selalu berjalan efektif.

Muhammad (2004: 110-111) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penyampaian pesan ke bawah:

- 1) Keterbukaan. Kurangnya sifat terbuka diantara atasan dan bawahan akan menyebabkan pemblokatan atau tidak mau menyampaikan pesan dan gangguan dalam pesan. Pada umumnya, atasan hanya mau memberikan informasi kepada bawahan bila mereka merasa bahwa pesan itu penting bagi penyelesaian tugas.
- 2) Penggunaan saluran. Kebanyakan para atasan lebih percaya pada pesan tulisan daripada pesan yang disampaikan secara lisan melalui tatap muka. Hal ini menyebabkan para atasan lebih banyak menyampaikan pesan secara tertulis berupa bulletin, booklet, memo, laporan sebagai pengganti kontak personal secara tatap muka antara atasan dan bawahan.
- 3) Kualitas pesan. Kualitas isi pesan akan berkurang bila berisi informasi yang panjang lebar, kurang obyektif, dan sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan bawahan tidak dapat menangkap isi pesan yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan.
- 4) Waktu. Ketepatan waktu pengiriman pesan mempengaruhi penyampaian informasi ke bawah. Atasan hendaknya mempertimbangkan saat yang tepat bagi pengiriman pesan dan dampak yang potensial kepada tingkah laku karyawan. Pesan seharusnya dikirim pada saat menguntungkan kepada kedua belah pihak yaitu atasan dan bawahan.
- 5) Penyaringan. Pesan-pesan yang dikirimkan oleh atasan tidaklah semua diterima oleh para bawahan. Tetapi akan disaring mana yang dibutuhkan. Karyawan yang kurang percaya pada pimpinannya, mungkin akan menolak pesan tersebut.

4). Kepemimpinan

Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakati bersama, sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Kepemimpinan (*leadership*) merupakan intisari manajemen. Dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan pegawai bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan proses manajemen suatu organisasi akan baik jika tipe, gaya, cara atau *style*

kepemimpinan yang ditetapkan manajernya baik.

Dalam melaksanakan aktivitas organisasi diperlukan kepemimpinan untuk memberikan arah dan menggerakkan sumber daya manusia yang ada. Dalam kepemimpinan terjadi proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan yang dipimpin. Efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kemampuan memotivasi, mengendalikan situasi, bertanggungjawab, adil, dan percaya diri.

Darsono dan Siswandoko (2011: 291) menyatakan bahwa praktek kepemimpinan merupakan pengambilan keputusan yang tepat dalam hal menetapkan tujuan yang dapat dicapai, menyediakan alat untuk mencapai tujuan, dan menempatkan orang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Disamping itu praktik kepemimpinan merupakan perwujudan kepribadian, yaitu:

- 1) Berperilaku adaptif. Artinya, dalam praktik kepemimpinan, pemimpin harus menyesuaikan perilakunya dengan perilaku anggota dan menyesuaikan pikirannya dengan pikiran anggota.
- 2) Mau belajar sepanjang masa (rendah hati). Belajar sepanjang masa artinya pemimpin harus belajar dari anggota.
- 3) Simpatik. Artinya pikiran dan tindakan harus mendapatkan tanggapan yang menyenangkan dari anggota.
- 4) Empatik. Artinya menghayati perasaan anggota.
- 5) Berpikir obyektif-kritis-dialektis. Berpikir obyektif artinya berpikir kongkrit atas hal-hal yang kongkrit; berpikir kritis artinya harus mempertanyakan sesuatu yang mapan, berubah, dan berkembang; berpikir dialektis artinya berpikir saling berhubungan, kontradiksi, perubahan, dan perkembangan pada setiap obyek.

2.3. Pengentasan Kemiskinan

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan pada umumnya banyak terdapat dan dijumpai pada negara-negara yang sedang berkembang dan negara keterbelakangan. Sangat jarang kita menjumpai adanya masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan terdapat pada Negara-negara yang sudah maju, atau sering kita sebut dengan negara industri.

Adisasmita (2005: 191) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang dihadapi di wilayah-wilayah baik yang sudah

maju maupun kurang maju, yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Utomo, dkk (2012: 31) menambahkan bahwa masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan usaha dan terbatasnya akses kepada prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Zahrawati dan Muchtar (2018: 385) secara tegas berpendapat bahwa salah satu penghambat dalam pembangunan suatu negara ialah kemiskinan. Kemiskinan ada karena keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Kemiskinan menghambat tercapainya pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan wilayah.

Menurut Suparlan (dalam Khomsan, 2015: 2), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong orang miskin.

Menurut Chambers dalam Khomsan dkk (2015: 3) dinyatakan bahwa kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut, yaitu bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah duduk di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- 3) Kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4) Kemiskinan struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Mubiarto (2009: 20) mengemukakan rincian dampak yang terjadi akibat kemiskinan, yaitu:

- 1) Banyaknya pengangguran.
- 2) Terciptanya perilaku kekerasan, ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan.
- 3) Banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.
- 4) Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat, Sehingga mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Ahmadi (2009: 344-345) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, yaitu:

- 1) *Pendidikan Yang Terlampau Rendah*. Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan di atas dia miskin karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 2) *Malas Bekerja*. Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini menyangkut mentalitas dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Atau bersifat pasif dalam hidupnya (*sikap bersandar pada nasib*). Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik dari keluarga, saudara atau famili yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.

- 3) *Keterbatasan Sumber Alam*. Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli, bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya “Alamiah Miskin”. Alamiah miskin yang dimaksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya.
- 4) *Terbatasnya Lapangan Kerja*. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang atau masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa “Skill” maupun modal.
- 5) *Keterbatasan Modal*. Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negaranegara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal bagi negara-negara yang sedang berkembang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tak berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal maupun dari segi penawaran akan modal.
- 6) *Beban Keluarga*. Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak atau meningkat pula tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan penambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya dan bersifat latent.

Prayitno dan Lincolin dalam Bungkaes (2013: 6) mengemukakan adanya karakteristik kemiskinan yang meliputi:

- 1) Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. Walaupun memiliki, tapi pada umumnya tidak mencukupi, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

- 2) Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kemampuan sendiri.
- 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, waktu mereka umumnya habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu lagi untuk belajar.
- 4) Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja diluar sektor pertanian.

2.4. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam Permensos RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinyatakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.

Penyaluran program bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian Kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Untuk mencapai keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka mekanisme pelaksanaannya harus diatur dengan baik.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 2, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT disebutkan bahwa, BPNT bertujuan untuk:

- 1) mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- 2) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT;

- 3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
- 4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Adapun manfaat BPNT untuk meningkatkan:

- 1) ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
- 3) akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- 4) transaksi nontunai; dan
- 5) pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Sedangkan besaran BPNT adalah Rp. 110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur sesuai kebutuhan di *E-warong*. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi.

Adapun berdasarkan Pasal 6,7,8, dan 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT disebutkan bahwa dalam penyaluran BPNT Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya. Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota. Secara lengkap mekanisme penyaluran BPNT adalah:

- 1) Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan *e-warong* berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) Koordinasi dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.

- 3) Bank Penyalur bersama tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen, dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT.
- 4) Persiapan e-warong dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai masalah yang serius karna saat ini kemiskinan membuat masyarakat Indonesia kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan dapat meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan juga bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan meperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat manusia” untuk mengimplementasikan pasal diatas berbagai upaya pemerintah telah dilakukan mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, termasuk kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan papan dan sandang.

Pelaksanaan program BPTN ini tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin, yang sebelumnya dikenal sebagai bantuan Raskin dan Rastra. Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara nontunai oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan. Melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli

bahan pangan di pedagang bahan pangan e-warong yang bekerjasama dengan Bank.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI No 63 Tahun 2017, tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai. Program BPNT diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan berkelanjutan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Namun dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut, belum mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pangan.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nurdin dan Hartati (2019: 76) mengatakan bahwa penelitian kualitatif yang dikenal di Indonesia adalah penelitian naturalistik atau “kualitatif naturalistik”, yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami *fenomena* tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara *holistik* dan dengan cara *deskriptif* dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2. Indikator Penelitian

Berdasarkan fokus dan rumusan permasalahan, maka indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor tingkah laku, dengan indikator partisipasi. pengakuan andil bawahan, - perilaku, dan pemberian perhatian.

- 2) Faktor hubungan kerja antar pegawai, dengan indikator kerjasama, saling menghormati, dan saling membutuhkan.
- 3) Faktor komunikasi, dengan indikator keterbukaan pimpinan, komunikasi, kualitas pesan, dan waktu.
- 4) Faktor kepemimpinan, dengan indikator perilaku adaptif, rendah hati, simpatik, dan berpikir obyektif.

3.3. Unit Analisis dan Setting Informan

Soehartono (2011: 29) menyatakan bahwa unit analisis menunjukkan siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Desa Sukamaju yang meliputi desa, pendamping, dan masyarakat. Sementara itu, berkaitan dengan teknik sampling dalam penelitian kualitatif, Arikunto (2006: 16-17) menyarankan empat teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) *Accidental sampling*, yaitu mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu yang tidak dirancang pertemuannya terlebih dahulu.
- 2) *Purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.
- 3) *Cluster-quota sampling*, yaitu memilih sejumlah responden dari wilayah tertentu sampai batas data yang diinginkan terpenuhi.
- 4) *Snow-ball sampling*, yaitu peneliti memilih informan secara berantai.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sugiyono (2014: 68-69) mengatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu dimana informan yang dipilih dianggap mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Adapun informan (sumber data) yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kepala Desa Sukamaju
- 2) Pendamping KPM BPNT Desa Sukamaju
- 3) KPM BPNT Desa Sukamaju (5 orang).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *human instrument*, artinya peneliti terjun langsung ke lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2017: 374-375) mengemukakan bahwa peneliti sebagai instrument penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus dipikirkannya bermakna atau tidak bagi penelitian;
- 2) Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus;
- 3) Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
- 4) Suatu situasi melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan pengetahuan semata.
- 5) Penelitian sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh.
- 6) Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perlakuan;
- 7) Dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu dihiraukan.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi program BPNT merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, masyarakat, proses, lingkungan, dan juga kebutuhan pangan masyarakat, baik itu yang berupa barang dan jasa dapat memenuhi kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Implementasi program BPNT secara umum harus dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan persepsi KPM atas BPNT yang mereka terima dengan pelaksanaan yang sesungguhnya mereka harapkan. Analisis terhadap implementasi program BPNT melalui e-Warong di Desa Sukamaju termasuk kategori cukup baik.

Pertama, analisis aspek tingkah laku masyarakat dalam implementasi program BPNT di Desa Sukamaju menunjukkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan terhadap indikator tingkah laku yaitu partisipasi, pengakuan andil

bawahan, pendelegasian wewenang, dan pemberian perhatian.

Dalam implementasi program BPNT di Desa Sukamaju, seorang Kepala Desa sebagai pemimpin harus menyadari betul bahwa baik perangkat desa maupun warga masyarakat adalah manusia yang mempunyai latar belakang yang heterogen, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, agama, kebudayaan, kepentingan dan lain sebagainya. Tetapi di samping perbedaan ini juga terdapat persamaan, seperti kebutuhan (*needs*) untuk makan, minum, keamanan, keturunan atau biologis. Persamaan kebutuhan inilah yang membentuk kerjasama dan hidup berkelompok. *Needs* (kebutuhan) adalah yang diperlukan oleh setiap orang, sedangkan *wants* (keinginan) adalah yang ditentukan oleh cita-cita seseorang.

Kepala Desa Sukamaju harus mampu memberikan motivasi kepada bawahannya agar bersedia untuk beraksi dan bertindak positif dalam pelaksanaan BPNT. Sesuai dengan teori Mangkunegara (2010: 61-62) menyatakan bahwa beberapa prinsip dalam memotivasi bawahan telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang menyimpulkan bahwa:

- 1) Kepala Desa Sukamaju memberi kesempatan perangkat desa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi program BPNT.
- 2) Kepala Desa Sukamaju telah menunjung tinggi prinsip mengakui andil bawahan baik perangkat desa maupun warga masyarakatnya dalam implementasi program BPNT.
- 3) Kepala Desa Sukamaju secara konsisten telah melaksanakan prinsip pendelegasian wewenang dalam implementasi program BPNT.
- 4) Kepala Desa Sukamaju telah membiasakan diri melaksanakan prinsip memberi perhatian dalam implementasi program BPNT.

Kedua, analisis aspek hubungan manusiawi dalam implementasi program BPNT di Desa Sukamaju cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan terhadap indikator hubungan manusiawi yaitu kerjasama, saling menghormati, dan saling membutuhkan.

Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat menghormati, saling membutuhkan dan kerjasama diantara semua pihak untuk mencapai tujuan. Kerjasama ini akan tercipta dan terbina dengan baik, jika ada pengertian kebersamaan, saling menguntungkan, dan adanya kesediaan mengorbankan sebagian dari kepentingannya masing-masing.

Sesuai dengan teori Siagian (2001: 154) yang mengemukakan bahwa implementasi program berhubungan erat dengan manusia yang ada di balik organisasi yaitu tumbuh kembangnya kemauan mereka secara ikhlas, sadar dan sukarela bersedia melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu aspek yang harus diperhatikan adalah manusia. Oleh karena itu, proses implementasi program, maka pelaksana perlu memahami benar tujuan organisasi dan prinsip-prinsip human relationship.

Dalam hubungannya dengan implementasi program BPNT di Desa Sukamaju, aspek hubungan manusiawi demi kelancaran program dan kesejahteraan masyarakat telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang menyimpulkan bahwa:

- 1) Kepala Desa Sukamaju menyadari pentingnya kerjasama dalam setiap pelaksanaan program.
- 2) Kepala Desa Sukamaju menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses implementasi program BPNT terlaksana dengan cukup baik karena adanya prinsip saling menghormati baik antar perangkat desa, antara perangkat desa dengan pendamping BPNT maupun antar PKM BPNT Desa Sukamaju.
- 3) Kepala Desa Sukamaju juga menyadari bahwa keberhasilan implementasi program BPNT bukanlah keberhasilan salah satu pihak saja, namun keberhasilan bersama semua unsur yang terlibat dalam BPNT.

Ketiga, analisis aspek komunikasi dalam implementasi program BPNT di Desa Sukamaju cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan terhadap indikator komunikasi yaitu keterbukaan pimpinan, komunikasi, kualitas pesan, dan waktu komunikasi.

Komunikasi sangat menentukan proses manajemen. Untuk menjalin hubungan yang baik antar individu diperlukan komunikasi yang efektif guna mencapai hubungan kerjasama yang baik. Proses komunikasi sebagai bentuk penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan tidaklah selalu berjalan efektif. Dalam hubungannya dengan implementasi program BPNT di Desa Sukamaju, konsep komunikasi telah dilakukan Kepala Desa Sukamaju dengan baik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang menyimpulkan bahwa:

- 1) Kepala Desa Sukamaju dalam pelaksanaan BPNT sangat menghargai prinsip keterbukaan.
- 2) Kepala Desa Sukamaju dalam penyampaian informasi terkait dengan BPNT berupaya menggunakan media secara jelas, baik melalui rapat perangkat dan warga, maupun rapat dengan pihak kecamatan.
- 3) Kepala Desa Sukamaju dalam menyampaikan informasi terkait BPNT berupaya agar informasi tersebut dapat diterima bawahannya maupun warga masyarakatnya secara jelas.
- 4) Kepala Desa Sukamaju dalam menyampaikan informasi terkait BPNT berupaya memilih waktu sebaik mungkin, tidak tergesa-gesa.

Keempat, analisis aspek kepemimpinan dalam implementasi program BPNT di Desa Sukamaju cukup baik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan informan, yang menyimpulkan bahwa:

- 1) Kepala Desa Sukamaju telah menerapkan perilaku adaptif secara baik.
- 2) Salah satu sifat Kepala Desa Sukamaju yang selama ini diterapkan dalam praktik kepemimpinannya adalah sifat rendah hati.
- 3) Dalam menerapkan praktik kepemimpinannya Kepala Desa Sukamaju telah bersikap simpatik.
- 4) Perilaku berpikir obyektif yang diterapkan Kepala Desa Sukamaju dalam pelaksanaan BPNT dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan cukup baik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, faktor perilaku pegawai dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik. *Kedua*, faktor hubungan kerja antar pegawai dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik. *Ketiga*, faktor komunikasi pegawai dalam kaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik. *Keempat*, faktor kepemimpinan Kepala Desa dalam kaitan dengan implementasi program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak cukup baik.

Di dalam mendukung implementasi program BPNT di Desa Sukamaju dan memastikan dimensi-dimensi yang telah berjalan baik tetap konsisten atau bahkan meningkat kinerjanya, maka peran e-warong sangat krusial. Peran tersebut mencakup (a) melayani distribusi penyaluran bantuan pangan, (b) memberdayakan masyarakat miskin, dan (c) meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap layanan keuangan inklusif.

Adapun saran penelitian atau rekomendasi kebijakan terkait implementasi program BPNT dan juga transformasi BPNT menjadi Program Sembako adalah (a) menyempurnakan pasokan bahan pangan, (b) memperbaiki jaringan internet dan infrastruktur serta penanganan masalah kartu penerima manfaat bantuan, (c) menyempurnakan mekanisme pendataan rumah tangga yang menjadi sasaran penerima bantuan, (d) menyempurnakan program bantuan sosial pangan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan wilayah, dan (e) meningkatkan intensitas keterlibatan dan kinerja Perum Bulog dalam rangka mendukung penyaluran bantuan sosial pangan dan urusan pangan nasional.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahadrjo. (2005). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graba Ilmu
- Ahmadi, Abu. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna*
- Darsono, P., dan Siswandoko, Tjatjuk. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Hasibuan, Malayu. S.P. (2019). *Manajemen, Dasar Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khomsan, Ali. Dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta:

Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Malawat, S.H., dan Liantie, E.E. (2019). Implementasi Program Layanan Sehari Selesai (Lari Say) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. *As Siyazah*, Vol. 4, No. 1, Mei 2019 ISSN: 2549-1865
- Mangkunegara, AA. Anwar Prabu. (2010). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Mubyarto. (2009). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Aditya Media
- Muhammad, Arni. (2004). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Praja, Dalem Tria Angga. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*. Vol. 14; No. 02; 2020; 01-07
- Rifa'i, Muhammad., dan Fadhli, Muhammad. (2013). *Manajemen Organisasi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Siagian, Sondang P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soehartono, Irawan. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, Dedi. Dkk. (2012). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, Hal. 29-34
- Yulianti, Devi. (2019). Implementasi Program Kemitraan Dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 1: 11-21
- Zahrawati, D dan Muchtar, H. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman. *Journal of Civic Education Volume 1 No. 4 2018.*